

**ANALISIS IMPLEMENTASI PENYAJIAN
LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAK
EMKM PADA PT BINTANG WIJAYA ABADI
BEKASI**

Dewi Rejeki

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Krisnadwipayana
Kampus Unkris
Jatiwaringin
email :
dewi_maksi@yahoo.com

ABSTRACT: *This research was conducted to determine the preparation of financial statements and whether the preparation of financial statements is in accordance with the SAK EMKM at PT Bintang Wijaya Abadi. The research method that will be used in this research is descriptive with a qualitative approach. This study uses primary data and secondary data. In addition, data is obtained through observation, interviews, and documentation. Financial report data taken from PT Bintang Wijaya Abadi in the form of daily cash reports, monthly bank statements, sales recapitulation and purchase recapitulation in 2017. The financial statements prepared by PT Bintang Wijaya Abadi are not in accordance with the SAK EMKM standar. The financial statements prepared by PT Bintang Wijaya Abadi only consist of the Daily Cash Report, Monthly Bank Reports, Sales Recapitulation and Purchase Recapitulation. The SAK EMKM states that the financial statements consist of the Financial Position Report, Income Statement and Notes to Financial Statements. In recognition, measurement and presentation by PT Bintang Wijaya Abadi is in accordance with SAK EMKM which uses an accrual basis.*

Keywords : SAK EMKM, Financial Statement

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian di Indonesia. Hal ini terbukti ketika negara kita mengalami krisis pada tahun 1998, dimana hampir seluruh sektor perekonomian di Indonesia lumpuh. Pada banyak perusahaan besar tidak mampu

bertahan diterpa krisis. Sebaliknya UMKM yang selama ini dipandang sebelah mata malah mampu bertahan, bahkan semakin berkembang.

UMKM terbukti menjadi salah satu pendorong dalam pembangunan di negara Indonesia bahkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkesinambungan. Hal ini disebabkan karena UMKM memiliki beberapa keunggulan yaitu: (1) cukup fleksibel dan sangat mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar, (2) menciptakan lapangan kerja yang lebih cepat menyerap tenaga kerja, (3) memiliki diversifikasi yang luas sehingga mampu berkontribusi secara signifikan dalam ekspor dan perdagangan.

Melihat peran penting UMKM tersebut, maka dibutuhkan dukungan dari semua pihak untuk mengembangkan dan mewujudkan UMKM yang lebih maju, mandiri dan modern termasuk memiliki akses pendanaan yang semakin luas ke sektor perbankan. Namun pada kenyataannya UMKM seringkali mengalami kendala untuk mengembangkan usahanya. Hal ini disebabkan oleh beberapa masalah yang dihadapi para pelaku UMKM, seperti : (1) rendahnya pendidikan, (2) kurangnya pemahaman teknologi informasi, dan (3) kendala dalam penyusunan laporan keuangan.

Para pelaku UMKM ini pada umumnya tidak menggunakan standar yang berlaku dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan UMKM ini seringkali menggunakan basis kas (*cash basis*), yang tentunya tidak mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Untuk itu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berusaha untuk memberikan kontribusi mengatasi hal tersebut dengan menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM), yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2018. SAK EMKM ini disusun sesederhana mungkin agar pelaku UMKM dapat dengan mudah mengimplementasikan. Komponen laporan keuangan dalam SAK EMKM hanya terdiri dari neraca, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan.

PT Bintang Wijaya Abadi merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang produksi barang berupa pisau *cutting* pola. PT Bintang Wijaya Abadi termasuk ke dalam golongan entitas dengan kategori menengah yang memiliki omset penjualan

samapai dengan tahun 2017 sebesar Rp 2.585.909.149. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pegawai bagian keuangan dan perpajakan terdapat adanya masalah yang terjadi di PT Bintang Wijaya Abadi yaitu tidak adanya kesesuaian dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Laporan keuangan yang disajikan selama ini hanya berupa laporan harian kas masuk dan keluar, laporan bank bulanan, rekapitulasi penjualan dan pembelian.

TINJAUAN PUSTAKA

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang dimaksud Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Adapun kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 20 Tahun 2008 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Usaha Mikro, memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) paling banyak Rp 50.000.000 atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000
2. Usaha Kecil, memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) antara Rp 50.000.000 dan Rp 500.000.000 atau memiliki hasil

penjualan tahunan antara Rp 300.000.000 dan Rp 2.500.000.000

3. Usaha Menengah, memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) antara Rp 500.000.000 dan Rp 10.000.000.000 atau memiliki hasil penjualan tahunan antara Rp 2.500.000.000 dan Rp. 50.000.000.000
- Menurut Badan Pusat Statistik (2017), jumlah tenaga kerja UMKM kurang dari 100 orang, dengan rincian kategori sebagai berikut:

Tabel 1

Kategori Jumlah Tenaga Kerja UMKM

Jenis Usaha	Jumlah Tenaga Kerja
a) Usaha Rumah Tangga dan Mikro	1 – 4 orang
b) Usaha Kecil	5 – 19 orang
c) Usaha Menengah	20 – 99 orang
d) Usaha Besar	100 orang atau lebih

Sumber : Badan Pusat Statistik (2017)

Tujuan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

SAK EMKM merupakan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang mempunyai tujuan untuk memudahkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau entitas mikro, kecil dan menengah untuk mampu membuat pelaporan keuangan sendiri. Dengan demikian SAK EMKM lebih sederhana dibandingkan dengan SAK IFRS sehingga akan lebih memudahkan dalam implementasinya akan tetapi tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan.

Menurut SAK EMKM (2016), tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas, seperti kreditor maupun investor. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Dalam SAK EMKM (2016), informasi keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai aset, liabilitas dan ekuitas pada tanggal tertentu dan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Unsur – unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut :

1. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang dari mana manfaat ekonomik di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh entitas.
2. Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik.
3. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya.

Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Berdasarkan SAK EMKM

Pengakuan unsur laporan menurut SAK EMKM (2016), merupakan proses pembentukan suatu pos dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Manfaat ekonomik yang terkait dengan pos tersebut dapat dipastikan akan mengalir ke dalam atau keluar dari entitas, dan
2. Pos tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal.

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa :

1. Aset
Aset diakui dalam laporan posisi keuangan ketika manfaat ekonomiknya di masa depan dapat dipastikan akan mengalir ke dalam entitas dan aset tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam laporan posisi keuangan jika manfaat ekonomiknya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas walaupun pengeluaran telah terjadi. Sebagai alternatif, transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi.
2. Liabilitas
Liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik dipastikan akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban entitas dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal.

3. Penghasilan
Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomik di masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

4. Beban
Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomik di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

Sedangkan pengukuran menurut SAK EMKM (2016:paragraf 2.15), adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan, dan beban di dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran unsur laporan keuangan dalam SAK EMKM adalah biaya historis. Biaya historis suatu aset adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Biaya historis suatu liabilitas adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal.

SAK EMKM (2016), menjelaskan bahwa penyajian wajar dari laporan keuangan kedalam sub bagian, sebagai berikut :

1. Penyajian Wajar
Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban. Penyajian wajar laporan keuangan mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi untuk mencapai tujuan :
 - a. Relevan : informasi dapat digunakan oleh pengguna untuk proses pengambilan keputusan.
 - b. Representasi tepat : informasi dalam laporan keuangan merepresentasikan secara tepat apa yang akan direpresentasikan dan bebas dari kesalahan material dan bias.
 - c. Keterbandingan : informasi dalam laporan keuangan entitas dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Informasi dalam laporan keuangan entitas juga dapat dibandingkan antar

- entitas untuk mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan.
- d. Keterpahaman : informasi yang disajikan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut ketekunan yang wajar.
 2. Kepatuhan Terhadap SAK EMKM
Entitas yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK EMKM membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SAK EMKM dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas tidak dapat mendeskripsikan bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap SAK EMKM, kecuali laporan keuangan tersebut telah patuh terhadap seluruh persyaratan dalam SAK EMKM.
 3. Frekuensi Pelaporan
Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan pada akhir setiap periode pelaporan, termasuk informasi komparatifnya.
 4. Penyajian yang Konsisten
Penyajian dan klasifikasi pos – pos dalam laporan keuangan antar periode entitas disusun secara konsisten.
 5. Informasi komparatif
Entitas menyajikan informasi komparatif yaitu informasi satu periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan periode berjalan.
 6. Laporan Keuangan
Laporan keuangan minimum terdiri dari:
 - a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode
 - b. Laporan laba rugi selama periode
 - c. Catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan rincian pos – pos tertentu yang relevan.
 7. Identifikasi Laporan Keuangan
Entitas mengidentifikasi secara jelas setiap laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, entitas menunjukkan informasi berikut dengan jelas dan diulangi bilamana perlu untuk pemahaman informasi yang disajikan

Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Laporan Posisi Keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. Posisi keuangan entitas dapat mencakup pos – pos berikut :

1. Kas dan setara kas.
2. Piutang Usaha.
3. Persediaan.
4. Aset tetap.
5. Utang usaha.
6. Utang Bank.
7. Ekuitas.

Laporan Laba Rugi Berdasarkan SAK EMKM

Laporan laba rugi entitas dapat mencakup pos – pos sebagai berikut :

1. Pendapatan.
2. Beban keuangan.
3. Beban pajak.

Catatan Atas Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Catatan atas laporan keuangan memuat :

1. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM.
2. Ikhtisar kebijakan akuntansi.
3. Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di PT Bintang Wijaya Abadi Bekasi yang berlokasi di Jl. Raya Pengasinan Tengah No.11A RT.005 RW.027 Pengasinan Rawa Lumbu, Kota Bekasi. Alasan memilih lokasi penelitian ini yaitu tersedianya akses untuk melaksanakan penelitian di perusahaan ini.

Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data primer didapatkan dengan melalui observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder merupakan data tambahan yang sudah diolah dan diperoleh dari kepustakaan dengan mempelajari literatur dan bacaan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas serta sumber – sumber yang mendukung. Data sekunder penelitian ini diperoleh dengan cara dokumentasi. atas laporan keuangan tahun 2017, struktur organisasi perusahaan, sejarah perusahaan dan

data catatan keuangan yang telah dibuat PT Bintang Wijaya Abadi.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Metode analisis ini khusus dilakukan pada data laporan keuangan berupa laporan harian kas, laporan bak bulanan, rekapitulasi penjualan dan pembelian tahun 2017.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Penyajian Laporan Keuangan

1. Laporan Posisi Keuangan

Tabel 2.

Laporan Posisi Keuangan

BINTANG WIJAYA ABADI LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2017			
ASET	Catatan		2017
	ii		
Kas dan setara kas			
Kas / Bank	(3)	Rp	73.282.477
Kas Kecil	(3)	Rp	10.775.382
Piutang Usaha	(6)	Rp	77.458.749
Piutang Karyawan	(6)	Rp	1.831.000
Persediaan Barang Dagang		Rp	603.537.032
Perlengkapan Kantor		Rp	5.200.000
Perlengkapan Pabrik		Rp	650.000
Sewa Dibayar Dimuka	(7)	Rp	12.166.667
Kendaraan		Rp	177.392.857
Mesin		Rp	30.821.428
Peralatan Kantor		Rp	400.000
Peralatan Pabrik		Rp	47.290.500
Akum. Peny. Kendaraan		Rp	(78.650.000)
Akum. Peny. Peralatan Kantor		Rp	(4.275.000)
Akum. Peny. Mesin		Rp	(10.343.750)
JUMLAH ASET		Rp	947.537.342
LIABILITAS			
Utang Usaha		Rp	88.088.588
PPN Terutang		Rp	219.829.263
Utang PPH 4 (2)		Rp	5.349.019
JUMLAH LIABILITAS		Rp	313.266.870
EKUITAS			
Modal		Rp	630.000.000
Saldo laba (defisit)		Rp	4.270.472
JUMLAH EKUITAS		Rp	634.270.472
JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS		Rp	947.537.342

Sumber : Data yang sudah diolah (2018)

2. Laporan Laba Rugi

Tabel 3.

Laporan Laba Rugi

PT BINTANG WIJAYA ABADI LAPORAN LABA RUGI PER 31 DESEMBER 2017			
PENDAPATAN	Catatan		2017
Penjualan	(10)		Rp2.585.909.149
Harga Pokok Penjualan :			
Persediaan Barang Jadi (Awal)		Rp	-
Harga Pokok Produksi		Rp	633.105.524
Barang yang siap dijual		Rp	633.105.524
Persediaan barang jadi (Akhir)		(Rp)	
Harga Pokok Penjualan			Rp (633.105.524)
Laba Kotor			Rp1.952.803.625
BEBAN			
Beban Operasional :			
Beban Administrasi & Umum		Rp	449.677.080
Beban Gaji		Rp	1.231.156.046
Beban Listrik, Telpn & Jaringan Internet		Rp	20.356.225
Beban Sewa Gedung		Rp	1.903.333
Beban Sewa Kendaraan		Rp	2.900.000
Beban Perbaikan & Perawatan		Rp	18.713.000
Beban Komunikasi		Rp	6.854.000
Beban Konsumsi		Rp	89.172.400
Beban Transportasi		Rp	12.124.500
Beban Yang Masih Harus Dibayar-PPH 4 (2)		Rp	5.349.019
Beban Lain – Lain		Rp	907.700
Beban Perlengkapan Kantor		Rp	7.585.600
Beban Perlengkapan Pabrik		Rp	837.000
Beban Penyusutan Kendaraan		Rp	78.650.000
Beban Penyusutan Peralatan Kantor		Rp	4.275.000
Beban Penyusutan Mesin		Rp	10.343.750
Beban Angkut Penjualan		Rp	7.728.500
Jumlah Beban Operasional			Rp1.948.533.153
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan			Rp 4.270.472
Pajak Penghasilan	(12)		Rp 25.859.091
Laba (Rugi) Setelah Pajak Penghasilan			Rp (21.588.619)

Sumber : Data yang sudah diolah (2018)

3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Tabel 4. Catatan Atas Laporan Keuangan

PT BINTANG WIJAYA ABADI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2017

1. UMUM

PT Bintang Wijaya Abadi didirikan di Bekasi Timur pada April tahun 2004. PT Bintang Wijaya Abadi adalah perusahaan industri (perusahaan manufaktur) yang bergerak dalam bidang produksi pisau *cutting dies* pola. PT Bintang Wijaya Abadi dalam menjual barang dagangnya secara kredit kepada konsumen. PT Bintang Wijaya Abadi memenuhi kriteria sebagai entitas mikro, kecil dan menengah sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008. Toko PT Bintang Wijaya Abadi berdomisili di Jl. Raya Pengasinan Tengah No. 11 A RW.005 RW.027 Pengasinan Rawalumbu, Kota Bekasi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan harus disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dengan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.

c. Piutang Usaha

Piutang usaha disajikan sebesar jumlah tagihan.

d. Persediaan

Biaya persediaan barang dagang meliputi biaya pembelian barang dagang. Biaya konversi meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Metode pencatatan persediaan PT Bintang Wijaya Abadi adalah metode periodik dengan menggunakan metode FIFO dalam menentukan biaya perolehan persediaan.

f. Aset Tetap

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya, jika aset tersebut dimiliki secara hukum oleh PT Bintang Wijaya Abadi. Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.

g. Pengakuan Pendaatan dan Beban

Pendapatan penjualan diakui ketika tagihan diterbitkan atau pengiriman dilakukan kepada pelanggan. Beban diakui saat terjadi transaksi pengeluaran kas untuk kegiatan usaha PT Bintang Wijaya Abadi.

g. Pajak Penghasilan

PT Bintang Wijaya Abadi sudah melakukan pembayaran pajak atas kegiatan usahanya. Pajak penghasilan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

3. KAS

2017

Kas kecil Jakarta – Rupiah Rp 10.775.382

Kas / Bank Rp 73.282.477

4. PIUTANG USAHA

Piutang Usaha Rp 77.458.749

a. BEBAN DIBAYAR DI MUKA

2017

Sewa Rp 12.166.667

6. SALDO LABA

Saldo laba usaha setelah pajak penghasilan PT Bintang Wijaya Abadi di bulan Desember 2017 yaitu sebesar Rp (21.588.619), maka terdapat artinya saldo tersebut rugi dan bukan laba usaha.

7. PENDAPATAN PENJUALAN

2017

Penjualan Rp 2.585.909.149

b. BEBAN PENGHASILAN PAJAK

Pajak Penghasilan Rp 25.859.091

Sumber : Data yang sudah diolah (2018)

Analisis Laporan Keuangan PT Bintang Wijaya Abadi berdasarkan SAK EMKM

1. Laporan Posisi Keuangan

a. Aset

1. Pengakuan

Berdasarkan SAK EMKM (2016), Aset diakui dalam laporan keuangan ketika manfaat ekonominya di masa depan dapat dipastikan akan mengalir ke dalam entitas dan aset tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal.

Pada PT Bintang Wijaya Abadi aset keuangan diakui hanya ketika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentual kontraktual aset keuangan tersebut. Diakui sebagai aset lancar dan dicatat sebesar nominalnya dalam pengakuan atas transaksi kas atau bank, kas kecil, piutang usaha, piutang karyawan, persediaan barang dagang, perlengkapan kantor, perlengkapan pabrik, sewa dibayar di muka dan PPN masukan. PT Bintang Wijaya Abadi mengakui kas pada saat terjadinya kas diterima dan dikeluarkan atau disebut akrual basis. Pada akun sewa dibayar di muka, perusahaan awalnya mencatat sebagai beban sewa untuk 1 (satu) tahun, sedangkan sewa dibayar di muka sendiri mulai diakui saat terjadinya penyesuaian pada jurnal penyesuaian yang terjadi hanya di bulan Desember tahun 2017. Terkait dengan persediaan, entitas mengakui persediaan ketika diperoleh, sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan persediaan mencakup seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi siap digunakan.

Berdasarkan SAK EMKM (2016), Aset tetap adalah aset yang dimiliki oleh entitas untuk digunakan dalam kegiatan normal usahanya dan diharapkan akan digunakan entitas untuk lebih dari satu periode. Aset tetap dicatat jika aset tetap tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas sebesar biaya perolehannya. Biaya

perolehan aset tetap memiliki harga beli dan biaya – biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan intensinya.

Aset tetap PT Bintang Wijaya Abadi yang diakui yaitu peralatan kantor, peralatan pabrik, kendaraan, mesin dan akumulasi penyusutan aset tetap. Pengakuan atas transaksi peralatan kantor, peralatan pabrik, kendaraan, mesin dan akumulasi penyusutan aset tetap yang dilakukan oleh PT Bintang Wijaya Abadi diakui sebagai aset tetap yang dicatat sebesar nominalnya. Akumulasi penyusutan aset tetap diakui pada saat terjadinya penyesuaian dalam jurnal penyesuaian yang dicatat sebesar nominalnya.

2. Pengukuran

SAK EMKM (2016), dasar pengukuran unsur laporan keuangan dalam SAK EMKM adalah biaya historis. Biaya historis suatu aset adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

Dalam laporan posisi keuangan PT Bintang Wijaya Abadi pada akun kas diukur berdasarkan saldo tunai yang dimiliki perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017. Kas atau bank masuk dicatat di dalam akun kas yang dilakukan pada saat terjadinya penerimaan kas, sedangkan kas keluar dicatat pada saat terjadinya pengeluaran kas atas biaya operasional dan pengeluaran lainnya. Pada transaksi piutang usaha, piutang karyawan, perlengkapan kantor, perlengkapan pabrik, persediaan barang dagang dan PPN masukan dicatat sesuai dengan jumlah sebesar nominalnya.

Teknik pengukuran biaya persediaan menggunakan metode biaya standar atau metode eceran, demi kemudahan, dapat digunakan jika hasilnya mendekati biaya perolehan. PT Bintang Wijaya Abadi belum sesuai dengan SAK EMKM dalam pengukuran persediannya

yaitu diukur sebesar biaya perolehan. Persediaan akhir pada PT Bintang Wijaya tidak sempat dicatat dikarenakan barang yang dijual kepada pelanggan sesuai dengan pesanan masuk yang bermacam – macam bentuk pesanan barang dagangan dengan harga yang bermacam – macam per unitnya, maka entitas juga tidak mencatat harga pokok penjualan dari persediaan yang ada. Dengan keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan waktu yang ada menyebabkan pencatatan persediaan tidak detail dan tidak teratur, sehingga PT Bintang Wijaya Abadi tidak membuat kartu stok persediaan. Dengan demikian persediaan akhir tidak diketahui oleh entitas seberapa besar persediaan yang tersisa.

Entitas dapat memilih menggunakan rumus biaya masuk pertama – keluar pertama (First In First Out) atau rata – rata tertimbang dalam menentukan biaya perolehan persediaan. Peneliti dalam mencatat persediaan pada PT Bintang Wijaya Abadi lebih memilih menggunakan metode FIFO secara periodik tanpa menyajikan kartu stok, yaitu metode yang digunakan dengan menghitung barang yang masuk pertama dan keluar pertama terlebih dahulu.

Berdasarkan SAK EMKM (2016), Entitas mengukur seluruh aset tetap, kecuali tanah, setelah pengakuan awal pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Entitas tidak mengakui penurunan nilai atas aset tetap maupun atas tanah dan bangunan yang dimiliki untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau untuk keduanya. Beban penyusutan diakui dalam laporan laba rugi. Penyusutan aset tetap dapat dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dan tanpa memperhitungkan nilai residu (nilai sisa). Penyusutan aset tetap dimulai ketika suatu aset tersedia digunakan. Umum manfaat aset ditentukan berdasarkan periode

kegunaan yang diperkirakan oleh entitas.

3. Penyajian

Berdasarkan SAK EMKM (2016), Aset keuangan saling hapus dan jumlah neto disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan memiliki internal untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset tersebut dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan. Entitas menyajikan aset keuangan dalam kelompok aset pada laporan posisi keuangan.

PT Bintang Wijaya Abadi menyajikan kas atau bank, kas kecil, piutang usaha, piutang karyawan, persediaan, perlengkapan kantor, perlengkapan pabrik, PPN masukan, sewa dibayar dimuka, peralatan kantor, peralatan pabrik, kendaraan, mesin disajikan dalam laporan posisi keuangan dalam kelompok aset.

b. Liabilitas

1. Pengakuan

SAK EMKM (2016), Liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dipastikan akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban entitas dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal. Liabilitas keuangan adalah setiap liabilitas yang berupa kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain. Liabilitas dicatat sebesar jumlah yang harus dibayarkan. Liabilitas dikeluarkan atau dihentikan pengakuannya ketika liabilitas tersebut telah dilunasi dengan kas atau setara kas dan atau aset non kas telah dibayarkan kepada pihak lain sebesar jumlah yang harus dibayarkan.

PT Bintang Wijaya Abadi mengakui liabilitas keuangan hanya ketika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual liabilitas keuangan tersebut. PT

Bintang Wijaya Abadi dalam melakukan usahanya dengan membeli persediaan barang dagang secara kredit, maka terdapat akun utang usaha, utang ppn, utang pph 21 dan utang pph pasal 4 (1). Utang usaha diakui sebagai utang lancar atau liabilitas lancar dan dicatat sebesar nominal pada saat pembelian secara kredit. Sedangkan utang pajak yang berupa utang ppn, utang pph pasal 21 dan utang pph pasal 4 (1) seharusnya dibayarkan pada saat dikatakan tanggal jatuh temponya.

2. Pengukuran

SAK EMKM (2016), dasar pengukuran unsur laporan keuangan dalam SAK EMKM adalah biaya historis. Biaya historis suatu liabilitas adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal. Liabilitas keuangan diukur sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan liabilitas keuangan diukur pada harga transaksi (*transaction price*). Liabilitas dicatat sebesar jumlah yang harus dibayarkan.

3. Penyajian

SAK EMKM (2016), Liabilitas disajikan dalam kelompok liabilitas dalam laporan posisi keuangan. PT Bintang Wijaya Abadi sudah memisahkan secara benar liabilitas jangka pendek yang berupa utang usaha, karena adanya pembelian persediaan secara kredit. Sedangkan untuk utang pajak PT Bintang Wijaya Abadi belum memisahkan secara jelas mengenai transaksi utang pajak atas apa saja yang termasuk ke dalam utang pajak.

c. Ekuitas

1. Pengakuan

Didalam SAK EMKM (2016) paragraf 2.2, ekuitas adalah hak residual atas set entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Paragraf 13.7 menyatakan bahwa modal yang disetor oleh pemilik dana dapat berupa kas atau setara kas atau aset non kas yang dicatat sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku. Modal saham, tambahan modal disetor, dan saldo laba rugi disajikan dalam kelompok ekuitas dalam laporan keuangan.

Ekuitas PT Bintang Wijaya Abadi terdiri dari modal usaha yang disetorkan oleh pemilik dan dicatat sebesar nominalnya kemudian diakui dalam akun ekuitas.

2. Pengukuran

SAK EMKM (2016), Modal yang disetor oleh pemilik dana dapat berupa kas atau setara kas atau aset non kas yang dicatat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk entitas yang berbentuk Perseroan Terbatas, pos tambahan modal disetor disajikan untuk setiap kelebihan setoran modal atas nilai nominal saham. Pada PT Bintang Wijaya modal awal yang disetor berasal dari dana pribadi pemilik perusahaan. Pencatatan modal pernah dilakukan diawal berdirinya perusahaan akan tetapi masih sebatas catatan modal saja.

3. Penyajian

Di dalam SAK EMKM (2016), Modal usaha, tambahan modal disetor, dan saldo laba rugi disajikan dalam kelompok ekuitas dalam laporan posisi keuangan.

2. Laporan Laba Rugi

a. Pendapatan

1. Pengakuan

Pada SAK EMKM (2016), Penghasilan atau pendapatan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Pendapatan diakui ketika terdapat hak atas pembayaran yang diterima atau yang masih harus diterima baik pada masa sekarang atau masa depan. Entitas dapat mengakui pendapatan dari suatu penjualan barang atau penyediaan jasa ketika barang tersebut telah dijual atau jasa telah diberikan kepada pelanggan.

Berdasarkan rekapitulasi penjualan dan laporan kas atau bank bulanan pada PT Bintang Wijaya Abadi, pendapatan yang diakui yaitu atas penjualan barang

dagang kepada pelanggan dan dicatat dalam akun penjualan.

2. Pengukuran

SAK EMKM (2016), Entitas mencatat pendapatan untuk manfaat ekonomi yang diterima atau yang masih harus diterima secara bruto. Entitas mengeluarkan dari pendapatan sejumlah nilai yang menjadi bagian pihak ketiga seperti pajak penjualan, pajak atas barang dan jasa, dan pajak pertambahan nilai. PT Bintang Wijaya Abadi dalam mengukur pendapatan usahanya berdasarkan penjualan barang dagang secara kredit sehingga mencatat pendapatan atau penjualan langsung ke pos penjualan dan membuat pencatatan atas pendapatan atau penjualan yang masih harus diterima.

3. Penyajian

Pada SAK EMKM (2016), dinyatakan bahwa pendapatan disajikan dalam kelompok pendapatan dalam laporan laba rugi.

b. Beban

1. Pengakuan

Di dalam SAK EMKM (2016), Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

Berdasarkan laporan harian kas dan laporan kas atau bank bulanan pada PT Bintang Wijaya Abadi terdapat beban yang diakui yaitu ada beban produksi dan beban operasional. Beban produksi terdiri dari beban bahan baku, beban tenaga kerja langsung dan beban *overhead* pabrik. Sedangkan pada beban operasional terdiri dari beban administrasi dan umum, beban gaji, beban listrik, telepon dan jaringan internet, beban penyusutan aset tetap, beban perlengkapan, beban sewa gedung, beban sewa kendaraan, beban perbaikan dan beban perawatan, beban komunikasi, beban konsumsi, beban pajak, dan beban lain – lain yang diakui dalam pos beban.

2. Pengukuran

PT Bintang Wijaya Abadi sudah melakukan pengukuran beban yang berdasarkan biaya historis, maka dari itu sudah sesuai dengan SAK EMKM. Pada SAK EMKM (2016), Pembayaran sewa

diakui sebagai beban sewa berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa.

3. Penyajian

SAK EMKM (2016), Beban disajikan dalam kelompok beban dalam laporan laba rugi.

c. Laba atau Rugi

1. Pengakuan

Laba rugi adalah selisih antara nominal pendapatan dan beban yang terdapat di dalam laporan laba rugi selama satu tahun periode. Berdasarkan laporan harian kas dan laporan bank bulanan PT Bintang Wijaya Abadi, laba rugi yang diakui adalah pos laba rugi sebelum pajak penghasilan.

2. Pengukuran

Laba rugi pada laporan laba rugi PT Bintang Wijaya Abadi diukur berdasarkan selisih antara penjualan dan beban produksi serta beban operasional.

3. Penyajian

Laba rugi disajikan dalam laporan laba rugi. Laba rugi pada PT Bintang Wijaya Abadi merupakan laba bruto karena belum dikurangkan dengan pajak penghasilan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai PPH yang bersifat final. Wajib Pajak yang dimaksud mempunyai kriteria yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas (bagi Wajib Pajak Orang Pribadi khususnya untuk pengecualian ini), dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam 1 (satu) Tahun Pajak. PPH terutang untuk Wajib Pajak (Wajib Pajak Badan) dihitung berdasarkan tarif 1% dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berupa jumlah peredaran bruto setiap bulan, untuk setiap tempat kegiatan usaha.

3. Catatan atas Laporan Keuangan

Di dalam SAK EMKM (2016) paragraf 6.4, Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk – silang ke informasi terkait dalam

catatan atas laporan keuangan. PT Bintang Wijaya Abadi belum membuat dan menyajikan catatan atas laporan keuangan yang menyebabkan kurangnya informasi dalam memahami keberadaan posisi keuangannya. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan SAK EMKM yang mewajibkan setiap badan usaha untuk membuat catatan atas laporan keuangan. Dengan demikian maka peneliti akan menyajikan catatan atas laporan keuangan PT Bintang Wijaya Abadi yang disusun sesuai dengan SAK EMKM.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan pada PT Bintang Wijaya Abadi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pencatatan, pembukuan dan penyusunan laporan keuangan masih sederhana. PT Bintang Wijaya Abadi belum menerapkan SAK EMKM dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan waktu untuk menyusun laporan. Selain itu juga karena pemahaman karyawan bagian keuangan PT Bintang Wijaya Abadi tentang SAK EMKM masih rendah.
2. Laporan keuangan yang disusun oleh PT Bintang Wijaya Abadi belum sesuai dengan standar SAK EMKM. Dimana laporan keuangan yang disusun oleh PT Bintang Wijaya Abadi hanya terdiri dari Laporan Harian Kas, Laporan Bank Bulanan, Rekapitulasi Penjualan dan Rekapitulasi Pembelian. Dalam SAK EMKM disebutkan bahwa laporan keuangan terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
3. Dalam pengakuan, pengukuran dan penyajian oleh PT Bintang Wijaya Abadi sudah sesuai dengan SAK EMKM yang menggunakan dasar akrual.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran dalam upaya pembenahan dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada PT Bintang Wijaya Abadi :

1. PT Bintang Wijaya hendaknya melakukan pencatan, pembukuan dan penyusunan keuangan sesuai dengan SAK EMKM.

Dapat menyediakan waktu lebih banyak lagi untuk mencatat setiap transaksi yang ada ke dalam jurnal. Mempekerjakan minimal satu karyawan yang mempunyai keahlian akuntansi secara profesional atau sebaiknya mengadakan bimbingan dan pelatihan tentang penerapan SAK EMKM karena dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam menyajikan laporan keuangan.

2. Dalam pembahasan diatas sudah dijelaskan dan disediakan rekomendasi laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM, sehingga rekomendasi tersebut bisa diterapkan dalam pembuatan laporan keuangan ditahun selanjutnya.
3. Adapun manfaat yang diperoleh dari pembuatan laporan keuangan secara lengkap dan sesuai dengan SAK EMKM yaitu dengan disajikannya laporan keuangan yang akurat, maka pihak perusahaan akan lebih mudah mendapatkan pinjaman dalam bentuk penambahan modal usaha.
4. Pencatatan atas aset tetap sebaiknya perusahaan membuat daftar penyusutan aset tetap untuk setiap tahunnya.
5. Persediaan yang dicatat oleh PT Bintang Wijaya Abadi belum sesuai dengan SAK EMKM, dikarenakan perusahaan hanya mencatat 1 (satu) akun persediaan saja berupa persediaan barang dagang. Sedangkan PT Bintang Wijaya Abadi adalah perusahaan manufaktur, sebaiknya mencatat akun persediaan lebih rinci lagi sebagaimana diharuskan dalam SAK EMKM, yaitu adanya persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses dan persediaan barang jadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Catur, Sasongko, dkk, 2016, *Akuntansi Suatu Pengantar Berbasis PSAK*, Buku 1, Jakarta : Salemba Empat
- Dwi, Martani, dkk, 2016, *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*, Edisi 2 Buku 1, Jakarta : Salemba Empat
- Dwi, Martani, dkk, 2017, *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*, Buku 2, Jakarta : Salemba Empat
- Hery, 2015, *Akuntansi Dasar 1 dan 2*, Cetakan ketiga, Jakarta : PT Grasindo

Ikatan Akuntan Indonesia, 2016, **Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah Efektif 1 Januari 2016**, Cetakan Kelima, Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia

Indra, Mahardika, 2017. **Pengantar Akuntansi**, Yogyakarta : Quadrant

James, M. Reeve, dkk, 2013, **Pengantar Akuntansi: Adaptasi Indonesia**, Buku 1, Jakarta : Salemba Empat

Sofia, Prima, Dewi, dkk, 2017, **Pengantar Akuntansi Sekilas Pandang Perbandingan dengan SAK yang Mengadopsi IFRS, SAK ETAP, SAK EMKM**, Bogor : In Media

V. Wiratna, Sujarweni, 2016, **Pengantar Akuntansi**, Yogyakarta : Pustaka Baru Press

LAMPIRAN

Pos-pos Dalam Daftar Akun

Pos-pos yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan PT Bintang Wijaya Abadi berdasarkan dari transaksi yang telah terjadi sampai dengan bulan Desember Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

Pos-pos Dalam Laporan Keuangan

Aset
Aset Lancar
Kas dan Bank
Kas Kecil
Piutang Usaha
Piutang Karyawan
Persediaan Barang Dagang
Perlengkapan Kantor
Beban Bahan Baku
Beban Tenaga Kerja Langsung
Beban Overhead Pabrik
Biaya Operasional
Beban Administrasi & Umum
Beban Gaji
Beban Listrik, Telepon & Jaringan Internet
Beban Penyusutan Peralatan Kantor
Beban Penyusutan Peralatan Pabrik
Beban Penyusutan Kendaraan
Beban Penyusutan Mesin
Beban Perlengkapan Kantor
Beban Perlengkapan Pabrik

Perlengkapan Pabrik
Sewa dibayar dimuka
PPN Masukan
Aset Tetap
Peralatan Kantor
Peralatan Pabrik
Kendaraan
Mesin
Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor
Akumulasi Penyusutan Kendaraan
Akumulasi Penyusutan Mesin
Hutang
Hutang Lancar
Hutang Usaha
PPN Terutang
Hutang PPh 4 (2)
PPN Keluaran
Modal
Modal Pemilik
Laba Ditahan
Laba Periode Berjalan
Ikhtisar Laba Rugi
Pendapatan
Penjualan
Beban Angkut Penjualan
Harga Pokok Penjualan
Pembelian
Beban Operasional
Biaya Produksi

Beban Sewa Gedung
Beban Sewa Kendaraan
Beban Perbaikan & Perawatan
Beban Komunikasi
Beban Konsumsi
Beban Transportasi
Beban yang masih harus dibayar – PPH Pasal 4 (2)
Beban Lain – Lain

Sumber : Data yang sudah diolah (2018)

**Checklist Pos-pos Dalam Laporan Posisi
Keuangan**

No.	Pos pada Neraca	Ada/Tidak
1.	Kas dan setara Kas	V
2.	Piutang Usaha	V
3.	Persediaan	V
4.	Aset Tetap	V
5.	Utang Usaha	V
6.	Utang Bank	X
7.	Ekuitas	V

